



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN REPUBLIK INDONESIA

Graha Mandiri, Jl. Imam Bonjol No. 61, Jakarta Pusat 10310
Email: humas@kemenkopangan.go.id

SIARAN PERS 37/SES.M.PANGAN.4/SP/06/2025

Kemenko Bidang Pangan Dorong Transformasi Sistem Pangan Lewat *Food Systems, Land Use, and Restoration* (FOLUR)

Jakarta, 16 Juni 2025 – Sebagai pengampu koordinasi kebijakan pangan nasional, Kementerian Koordinator Bidang Pangan berperan aktif dalam mendorong transformasi sistem pangan berkelanjutan melalui Proyek Food Systems, Land Use, and Restoration (FOLUR), sebuah inisiatif global berdurasi tujuh tahun yang diimplementasikan di 27 negara dengan dukungan Global Environment Facility (GEF). Dalam rangka mendukung evaluasi paruh waktu proyek (Mid-Term Review), Kemenko Bidang Pangan menyelenggarakan lokakarya pembelajaran nasional di Jakarta, sekaligus menyambut kunjungan strategis dari GEF Secretariat, UNDP Regional, dan FAO Regional sebagai mitra utama pelaksana.

Lokakarya pembelajaran yang bertajuk "*Leveraging Public-Private Partnerships and Sharing Policy Coherence of FOLUR Indonesia Implementation*" ini mempertemukan sekitar 100 peserta dari perwakilan kementerian dan lembaga, sektor swasta, masyarakat sipil, dan organisasi internasional, yang berperan sebagai mitra strategis untuk menilai kemajuan jangka menengah proyek, berbagi pembelajaran, dan memperkuat kolaborasi lintas sektoral.

Radian Bagiyono, Asisten Deputi Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Kementerian Koordinator Bidang Pangan sekaligus National Project Director FOLUR Project Indonesia, menyampaikan bahwa kemitraan internasional menjadi fondasi penting dalam upaya mewujudkan keberlanjutan pada rantai nilai komoditas di Indonesia. "Kehadiran GEF Secretariat bersama mitra pelaksana UNDP dan FAO mencerminkan komitmen kolektif untuk mendukung transformasi sistem pangan nasional. Pemerintah Indonesia memandang kerja sama global ini sebagai elemen kunci dalam mendorong pertanian yang berkelanjutan serta pelestarian keanekaragaman hayati dan lingkungan hidup," ujarnya.

Lokakarya ini terdiri dari dua sesi utama yang berfokus pada: (1) Kemitraan Publik-Swasta (Public-Private Partnership/PPP) dan Kemitraan Masyarakat Publik-Swasta (Public-Private-Community Partnership/PPCP), serta (2) pendalaman materi terkait Koherensi Kebijakan.

Sesi PPP/PPCP membahas berbagai model pembiayaan inovatif, peran aktif industri, serta mekanisme dukungan bagi petani untuk mendorong praktik pertanian berkelanjutan. Sementara itu, sesi pendalaman Koherensi Kebijakan menyoroti pentingnya penyelarasan implementasi Proyek FOLUR dengan prioritas pembangunan nasional dan komitmen global, termasuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta konservasi keanekaragaman hayati.

Proyek FOLUR Indonesia bertujuan mendukung transformasi sektor pangan melalui pendekatan pengelolaan lanskap terpadu di lima wilayah prioritas, yaitu Aceh (Aceh Tengah), Sumatera Utara (Mandailing Natal), Kalimantan Barat (Sanggau), Sulawesi Selatan (Luwu), dan Papua Barat Daya (Sorong). Lanskap-lanskap ini memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan, keanekaragaman hayati, dan ketahanan iklim Indonesia. Dengan target

pengelolaan terpadu seluas 1,5 juta hektar, proyek ini berupaya menyeimbangkan konservasi keanekaragaman hayati dengan peningkatan produktivitas komoditas berkelanjutan, seperti kelapa sawit, kopi, kakao, dan beras.

"Koherensi kebijakan pada dasarnya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah di semua tingkatan, hingga ke tingkat desa. Kami berkomitmen untuk membina dan mendukung para pegiat lokal (local champions) yang menjadi penggerak utama implementasi kebijakan di lapangan. Kita tidak bekerja sendiri—kita akan bermitra dan berkolaborasi dengan pemerintah, sektor swasta, dan komunitas," ujar Ratna Sari, National Project Manager FOLUR.

Melalui dialog multi-pihak dan penguatan koherensi kebijakan, proyek ini telah menyelesaikan studi awal *Targeted Scenario Analysis* (TSA) dan Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) di 3 (tiga) provinsi, yaitu Aceh-Aceh Tengah, Sumatera Utara-Mandailing Natal, dan Sulawesi Selatan-Luwu, sebagai dasar untuk mengembangkan rencana penggunaan lahan berbasis lanskap dan skenario (*Sustainable Ecosystem Management / SEM*) yang mendukung para pihak dalam melestarikan ekosistem. Proyek ini juga didukung oleh skema *co-financing*, yang mencerminkan adanya kerjasama dan kolaborasi yang kuat dengan sektor swasta dan investasi dalam rantai nilai komoditas berkelanjutan.

Dengan mendorong dialog inklusif, memperkuat tata kelola, dan memobilisasi *co-financing*, Proyek FOLUR Indonesia berkontribusi pada masa depan yang tangguh, adil, dan ramah lingkungan—baik di tingkat nasional maupun sebagai bagian dari platform FOLUR Global. Melalui peran koordinatif Kementerian Koordinator Bidang Pangan, komitmen Indonesia dalam mewujudkan sistem pangan yang berkelanjutan terus diperkuat, demi pembangunan masa depan yang lebih baik bagi manusia dan alam.

Narahubung.

Kepala Biro Umum, Keuangan dan Komunikasi Devid.Y. Mohammad.
081288119482